

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA
OLEH PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB)
DI DESA KARANGJALADRI KECAMATAN PARIGI
KABUPATEN PANGANDARAN**

SHISKA TRIANZIANI

ABSTRAK

Hasil observasi penulis diketahui bahwa pelaksanaan Program KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran masih belum optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana pelaksanaan Program KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) ?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB)?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB)? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa: 1) Pelaksanaan Program KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) secara umum sudah dilaksanakan walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program KB menurut buku pedoman TPD (2012:61). Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan bahwa pelaksanaan Program KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) yang menyatakan sudah baik sebesar sebesar 14,16 % dan yang menyatakan masih kurang sebesar 85,84 %. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) belum dapat terlaksana dengan baik hal ini dibuktikan dengan masih adanya beberapa permasalahan yang terjadi seperti tida lengkapnya data yang dimiliki oleh kader sebagai bahan evaluasi ketercapaian program KB serta kurangnya pembinaan kader IMP yang ada sehingga tidak optimal dalam melaksanakan perannya selain itu pada tahap pelaksanaan petugas PLKB kurang melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait sehingga program KB belum terlaksana secara optimal. 2) Berdasarkan hasil wawancara bahwa terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB), antara lain yaitu : kurangnya kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait sehingga menyebabkan dukungan dari berbagai pihak dalam melaksanakan program KB masih kurang. Untuk mengatasi berbagai hambatan-hambatan pelaksanaan Program KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB), maka dilakukan berbagai upaya yang antara lain: Melakukan pendekatan dan kerjasama melalui staf meeting sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan dalam melaksanakan program KB.

Kata Kunci : Program KB, PLKB.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan berbagai jenis masalah. Masalah utama yang dihadapi di Indonesia adalah di bidang kependudukan yang masih tingginya pertumbuhan penduduk. Keadaan penduduk yang demikian telah mempersulit usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk semakin besar usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya untuk menekan laju pertumbuhan dengan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB).

Pertumbuhan dan kemampuan mengembangkan sumber daya alam laksana deret hitung, sedangkan pertumbuhan dan perkembangan manusia laksana deret ukur, sehingga pada suatu titik sumber daya alam tidak mampu menampung pertumbuhan manusia yang sangat cepat sekali. Diharapkan setiap keluarga memperhatikan dan merencanakan jumlah keluarga yang diinginkan berkenaan dengan hal tersebut. Paradigma baru program KKB nasional telah diubah visinya dari mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) menjadi “Keluarga Berkualitas 2025” untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas adalah keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Masalah kependudukan di Indonesia sampai saat sekarang belum dapat diatasi. Permasalahan ini antara lain diwarnai jumlah yang besar dengan pertumbuhan yang tinggi, serta angka kelahiran yang tinggi. Secara garis besar terdapat tiga aspek permasalahan kependudukan di Indonesia yaitu struktur umur muda, kualitas pendudukan, dan persebaran penduduk antar wilayah yang tidak merata (BKKBN, 2013). Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2010 sebanyak 237,6 juta jiwa, terdiri atas 119,6 juta pria dan 118 juta wanita dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49% per tahun sehingga merupakan jumlah penduduk terbesar keempat didunia setelah China, India, dan Amerika Serikat.

Pertumbuhan penduduk ini tentu saja berimplikasi secara signifikan terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan negara. Berdasarkan jumlah tersebut, maka setiap harinya penduduk Indonesia bertambah sebesar 9.027 jiwa. Setiap jam terjadi penambahan pertumbuhan penduduk sebanyak 377 jiwa, bahkan setiap detik jumlah penambahan penduduk masih tergolong tinggi yaitu sebanyak 1,04 % (1-2 juta jiwa). Pertambahan penduduk di Indonesia umumnya bisa dikatakan 99,9% disebabkan oleh kelahiran, sisanya berupa migrasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam 1 detik di Indonesia terjadi

kelahiran bayi sebanyak 1-2 jiwa (Irianto, 2014). Oleh karena itu, dibentuklah suatu program Keluarga Berencana (KB) untuk mengatasi permasalahan di atas guna mencapai tujuan pembangunan jangka panjang bidang kesehatan.

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan jumlah penduduk. Meskipun program KB telah dilakukan, namun jumlah penduduk Indonesia masih terus bertambah.

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yang terus meningkat. Hal ini dibuktikan dengan hasil sensus penduduk yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia sudah melebihi dari proyeksi Badan Pusat Statistik Indonesia (Indrayani, 2014) serta upaya pemerintah dalam pengendalian kuantitas penduduk melalui Keluarga Berencana, pengembangan dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas. Perwujudan keluarga kecil yang berkualitas dapat dilakukan melalui program keluarga berencana. Pelaksanaan keluarga berencana ini salah satunya dengan penggunaan alat kontrasepsi yang tersedia bagi pria dan wanita.

Program KB adalah salah satu program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini salah satu tujuannya adalah penjarangan kehamilan menggunakan metode

kontrasepsi dan menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat melalui usaha-usaha perencanaan dan penjarangan penduduk. Program kependudukan dan KB merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia (SDM).

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bahwa : "Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar". Selanjutnya pada pasal 12 ayat (2) dijelaskan bahwa : "Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah pengendalian penduduk dan keluarga berencana". Undang-undang ini telah di perjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga pada Pasal 37 ayat (1) dijelaskan bahwa : "Penggerakan penyelenggaraan Keluarga Berencana dilaksanakan melalui mekanisme operasional pelayanan dasar Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana".

Pembangunan Kependudukan dan Keluarga berencana merupakan salah satu program sosial dasar yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk dan

sekaligus berkontribusi terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk. Untuk melaksanakan program tersebut telah mendapat dukungan yang kuat dengan adanya komitmen nasional yaitu telah dilembagakannya program KKB nasional melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Dengan disahkannya undang-undang tersebut bangsa Indonesia telah mempunyai komitmen resmi untuk membangun keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Untuk mewujudkan apa yang dimaksudkan dengan Keluarga Berencana tersebut, maka pemerintah sebagai *policy maker* telah berupaya dengan membuat berbagai kebijakan yang diturunkan menjadi berbagai program Keluarga Berencana demi berkurangnya masalah kependudukan yang ada.

Salah satu upaya dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk tersebut adalah melalui peningkatan pelayanan program KB. Program KB merupakan sebuah program yang pemerintah buat, dimana di dalam program tersebut terdapat berbagai kegiatan medis seperti pemakaian dan pelepasan alat kontrasepsi KB serta terdapat berbagai penyuluhan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, serta terdapat juga pelayanan untuk masyarakat apabila ada yang ingin berkonsultasi mengenai masalah

kesehatan. Adapun mekanisme dari kegiatan program ini ialah pemerintah seperti menjemput bola, karena sifatnya yang dinamis. Terdapat berbagai kemudahan dalam program ini, yaitu berbagai fasilitas telah dikerahkan pemerintah untuk masyarakat yang mau mengikuti program KB ini, serta tidak dipungut biaya sama sekali. Program ini merupakan salah satu kegiatan yang diadakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk menahan atau meminimalisir angka kelahiran serta mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat.

Pelaksanaan program KB tidak lagi semata mata diarahkan hanya kepada upaya pencapaian target kuantitas penduduknya, melainkan jauh lebih luas lagi sudah harus menyentuh banyak aspek terkait dengan upaya kualitas dalam rangka mewujudkan sebuah keluarga yang berkualitas.

Dalam rangka pelaksanaan program KB di Kabupaten Pangandaran maka Dinas Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Parigi melakukan berbagai upaya untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program KB dengan melakukan kerjasama baik dengan UPTD Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Parigi yang ada di kecamatan maupun dengan

instansi lain yang mendukung terlaksananya program KB.

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program KB di Kabupaten Pangandaran maka UPTD Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Parigi melibatkan berbagai unsur yang terkait seperti petugas lapangan KB untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan program KB dan institusi masyarakat pedesaan yang ada di Kecamatan Parigi sehingga ada kerjasama yang lebih baik lagi dalam pelaksanaan program KB.

Kegiatan pelayanan program KB dilaksanakan oleh UPTD Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Parigi di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dengan memberikan pelayanan KB berupa pemasangan alat kontrasepsi secara gratis kepada akseptor (peserta KB, yang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi) di setiap desa atau kecamatan. Kegiatan ini melibatkan sejumlah ahli medis seperti penyuluh dari Dinas Kesehatan, ahli dari Puskesmas setempat dan ahli lainnya untuk melakukan pemasangan atau pencopotan alat kontrasepsi kepada para akseptor, khususnya kepada Pasangan Usia Subur (PUS).

Dengan demikian dalam pelaksanaan program KB maka petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

harus melaksanakan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program KB menurut buku pegangan Tenaga Penggerak Desa (2012:61) sebagai berikut:

1. Melaksanakan tahap persiapan untuk menyiapkan data dasar program KB di setiap RT sebagai dasar dalam penyusunan peta kerja untuk memudahkan penyusunan perencanaan pelaksanaan program KB.
2. Melaksanakan kerjasama dengan seluruh komponen yang ada di masyarakat untuk menganalisa berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program KB sebagai dasar dalam penyusunan mekanisme operasional di setiap wilayah.
3. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk membahas teknis operasional pelaksanaan program KB sehingga setiap kegiatan dapat memperoleh dukungan.

Namun sebagaimana hal tersebut di atas, berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan Program KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum optimal, terlihat bahwa di Desa Karangjaladri dalam waktu tiga tahun terakhir mengalami kenaikan jumlah penduduk yang sangat cepat, yaitu hampir 4% per tahun. Untuk mengatasi hal tersebut, maka peran Petugas Lapangan KB (PLKB) sangatlah penting dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Permasalahan tersebut sejalan dengan hasil observasi awal yang penulis lakukan ditemukan gejala-gejala bahwa pelaksanaan Program KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran masih belum optimal, dapat dilihat pada indikator-indikator sebagai berikut :

1. Terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tahap persiapan untuk menyiapkan data dasar program KB di setiap RT sebagai dasar dalam penyusunan peta kerja untuk memudahkan penyusunan perencanaan pelaksanaan program KB. Contohnya masih kurangnya informasi tentang gambaran perkembangan program KB di setiap wilayah sehingga terdapat pasangan usia subur yang tidak menggunakan alat kontrasepsi.
2. Masih kurangnya pelaksanaan kerjasama dengan seluruh komponen yang ada di masyarakat untuk menganalisa berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program KB sebagai dasar dalam penyusunan mekanisme operasional di setiap wilayah. Contohnya masih kurangnya pendekatan yang dilakukan dengan tokoh formal maupun informal dalam membantu mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program KB sehingga permasalahan tersebut tidak cepat diselesaikan.

3. Masih kurangnya pelaksanaan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk membahas teknis operasional pelaksanaan program KB sehingga setiap kegiatan kurang memperoleh dukungan. Contohnya : masih kurangnya dukungan anggaran biaya yang memadai dalam melaksanakan program KB sehingga berbagai kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat direalisasikan. Seperti program pertemuan dengan akseptor kurang dilaksanakan secara rutin karena kurangnya anggaran sehingga selama 6 bulan baru dilakukan pertemuan 1 kali.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam mengenai pelaksanaan Program KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan Program KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam

pelaksanaan Program KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran ?

B. LANDASAN TEORITIS

Salah satu pihak yang dapat mendorong keberhasilan suatu program KB di masyarakat adalah Petugas Lapangan Keluarga Berencana. Keberhasilan program keluarga berencana dititikberatkan pada peran dan fungsi Petugas Lapangan Keluarga Berencana dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam program KB. Menurut Sutrisno (2009:28) menyatakan bahwa :

PLKB/PKB adalah Pegawai Pemerintah Daerah (Pemda) Kab/Kota berkedudukan di Desa/Kelurahan yang bertugas melaksanakan/mengelola, menggerakkan, memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program kependudukan dan KB bersama institusi masyarakat pedesaan/perkotaan ditingkat Desa/Kelurahan.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2007: 5) penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) adalah : “Aparat SKPD pengelola program kabupaten/kota berkedudukan di tingkat desa/kelurahan yang berfungsi sebagai pembantu Teknis kepala Desa/kelurahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana”.

Salah satu aspek yang menunjang keberhasilan program KB adalah penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB). Secara umum tujuan PLKB menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2007:3) adalah: Meningkatkan dan memantapkan peran petugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam mengelola Program Keluarga Berencana melalui mekanisme operasional dan berbagai jenis pencatatan pelaporan Program Keluarga Berencana yang berada pada lini lapangan.

Menurut Mahardika (2012:89) menyatakan, bahwa PLKB/PKB adalah Pegawai Pemerintah Daerah (Pemda) Kab/Kota berkedudukan di Desa/Kelurahan yang bertugas melaksanakan atau mengelola, menggerakkan, memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program kependudukan dan KB bersama institusi masyarakat pedesaan atau perkotaan ditingkat Desa/Kelurahan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, bahwa untuk mencapai tujuan pelaksanaan program keluarga berencana diperlukan petugas lapangan yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang tujuan dan manfaat dari kebijakan program keluarga berencana. Keluarga dengan jumlah anak yang tidak banyak serta jarak kelahiran yang ideal tentu diharapkan keluarga mampu menciptakan manusia-manusia yang

berkualitas. Usia ideal untuk perkawinan yang diharapkan dilakukan oleh masyarakat bertujuan agar masyarakat mempunyai cukup kesadaran dan kesiapan yang matang dalam perilakunya sehingga akan mampu pula berpikir secara tepat mengenai masa depan keluarga yang dibangun, meliputi jumlah anak dan jarak kelahiran yang ideal.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan program dikemukakan oleh Farida (2008:9), bahwa: "Pelaksanaan program merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh." Lebih lengkap lagi, Hasibuan (2006: 72) juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan program adalah suatu pelaksanaan jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan program merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya yang dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, dalam buku pegangan TPD (2012:61) yang dinyatakan bahwa terdapat tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program KB yang antara lain sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

1.) Penyiapan data dasar program KB di daerah kerja petugas/pelaksana program, meliputi :

- a) Menyiapkan data dasar program KB mencakup data demografi, data program KB, data keluarga dan data tahapan Keluarga sejahtera.
- b) Menyusun peta kerja agar petugas dan pengelola program KB dapat bekerja secara terarah dan tepat pada sasarannya.
- c) Melaksanakan pendataan keluarga secara berkala serta melakukan pencatatan rutin

2.) Melaksanakan analisis data dasar untuk memperoleh informasi tentang kondisi dan gambaran perkembangan program KB, melaksanakan teknik dan cara menganalisis data melalui pembahasan staf meeting sehingga petugas memiliki kejelasan sasaran untuk diolah lebih lanjut dalam mekanisme operasional.

b. Tahap Pelaksanaan

- 1.) Melaksanakan staf meeting (pertemuan staf).
- 2.) Pertemuan koordinasi teknis pelayanan KB.
- 3.) Pertemuan koordinasi KB tingkat kecamatan.
- 4.) Pertemuan koordinasi minggonan (rapat minggon).

- 5.) Pertemuan institusi masyarakat tingkat kecamatan. program KB yang antara lain, sebagai berikut:
- 6.) Pertemuan institusi masyarakat tingkat desa. a. Tahap Persiapan
- 7.) Pertemuan dengan kelompok askektor KB. a. Penyiapan data dasar program KB di daerah kerja petugas/pelaksana program, meliputi :
- 8.) Pertemuan pelayanan kontrasepsi, pelayanan bina-bina keluarga dan peningkatan ekonomi keluarga. 1) Menyiapkan data dasar program KB mencakup data demografi, data program KB, data keluarga dan data tahapan Keluarga sejahtera.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik analisa data dengan dengan cara deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data serta menginterpretasikannya pada data kualitatif.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Program KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Pelaksanaan Program KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan buku pegangan TPD (2012:61) yang dinyatakan bahwa terdapat tahapan-tahapan dalam pelaksanaan

- b. Tahap Pelaksanaan
 - a. Melaksanakan staf meeting (pertemuan staf).
 - b. Pertemuan koordinasi teknis pelayanan KB.
 - c. Pertemuan koordinasi KB tingkat kecamatan.
 - d. Pertemuan koordinasi minggonan (rapat minggon).

- e. Pertemuan institusi masyarakat tingkat kecamatan.
 - f. Pertemuan institusi masyarakat tingkat desa.
 - g. Pertemuan dengan kelompok akseptor KB.
 - h. Pertemuan pelayanan kontrasepsi, pelayanan bina-bina keluarga dan peningkatan ekonomi keluarga.
- dapat menyiapkan data dasar program KB sebagai informasi yang tepat, cepat dan akurat, hal ini dikarenakan kurangnya dukungan semua pihak terkait dalam mengumpulkan data dasar yang dibutuhkan PLKB sehingga hal tersebut mengakibatkan petugas lapangan KB kesulitan dalam mengetahui perkembangan program KB di suatu wilayah.

Untuk lebih jelasnya penulis melakukan pembahasan hasil penelitian terhadap tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program KB yang, antara lain :

1. Tahap Persiapan
- a. Penyiapan data dasar program KB di daerah kerja petugas/pelaksana program, meliputi:
 - 1) Menyiapkan data dasar program KB mencakup data demografi, data program KB, data keluarga dan data tahapan Keluarga sejahtera.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PLKB masih kurang menyiapkan data dasar program KB mencakup data demografi, data program KB, data keluarga dan data tahapan Keluarga sejahtera hal ini dikarenakan masih kurangnya PLKB dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah desa dalam pengumpulan data dasar program KB serta kurangnya dukungan kader yang ada di tiap wilayah dalam membantu menyiapkan data dasar.

Dengan demikian PLKB belum dapat memberikan informasi dalam pengelolaan program KB karena belum

- 2) Menyusun peta kerja agar petugas dan pengelola program KB dapat bekerja secara terarah dan tepat pada sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PLKB masih kurang menyusun peta kerja sehingga petugas dan pengelola program KB belum bekerja secara terarah dan tepat pada sasarnya, hal ini dikarenakan kurangnya kader membantu PLKB dengan memberikan data dasar program KB yang dibutuhkan dalam penyusunan peta kerja sehingga menyebabkan petugas dan pengelola program KB belum dapat mencapai sasaran pelaksanaan program KB.

Dengan demikian penyusunan peta kerja agar petugas dan pengelola program KB dapat bekerja secara terarah dan tepat pada sasarnya belum terlaksana dengan baik mengingat kurangnya dukungan data dasar yang diperoleh PLKB dalam menyusun peta kerja sebagai sasaran dalam bekerja.

- 3) Melaksanakan pendataan keluarga secara berkala serta melakukan pencatatan rutin.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PLKB belum dapat melaksanakan pendataan keluarga secara berkala serta melakukan pencatatan rutin data KB dan data yang relevan dengan kegiatan baru yang akan dikembangkan (misalnya BKB, BKR, BKL) hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan tokoh formal terkait dan tokoh informal di masing-masing RW/RT sehingga belum dapat melakukan pemetaan data sebagai dasar kegiatan operasional ke depan.

Dengan demikian pelaksanaan pendataan dan pencatatan yang dilakukan oleh PLKB belum dilaksanakan secara rutin hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan sumber daya manusia yang memadai sehingga PLKB kesulitan dalam melaksanakan pendataan dan pencatatan data kependudukan.

- b. Melaksanakan analisis data dasar untuk memperoleh informasi tentang kondisi dan gambaran perkembangan program KB, melaksanakan teknik dan cara menganalisis data melalui pembahasan *staf meeting* sehingga petugas memiliki kejelasan sasaran untuk diolah lebih lanjut dalam mekanisme operasional.
- 1.) Melaksanakan analisis data dasar untuk memperoleh informasi tentang kondisi dan gambaran perkembangan program KB

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PLKB kurang melaksanakan analisis data dasar untuk

memperoleh informasi tentang kondisi dan gambaran perkembangan program KB hal ini dikarenakan masih kurangnya PLKB melakukan kunjungan langsung ke setiap rumah sehingga belum memiliki data dasar program KB yang dapat berguna untuk melakukan analisis data dasar sehingga belum dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan masyarakat.

Dengan demikian pelaksanaan analisis data dasar untuk memperoleh informasi tentang kondisi dan gambaran perkembangan program KB belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh PLKB karena kurangnya dalam melakukan kunjungan rutin ke setiap rumah serta kurangnya dukungan dari kader yang ada di tiap wilayah sehingga belum dapat memberikan informasi terkait perkembangan KB di setiap wilayah.

- 2.) Melaksanakan teknik dan cara menganalisis data melalui pembahasan *staf meeting* untuk melaksanakan mekanisme operasional.

Berdasarkan hasil penelitian PLKB masih kurang melaksanakan teknik dan cara menganalisis data melalui pembahasan *staf meeting* untuk melaksanakan mekanisme operasional di setiap wilayah di desanya karena kurangnya dukungan kemampuan teknis yang dimiliki oleh kader institusi masyarakat yang ada di tiap desa.

Dengan demikian selama ini masih kendala dalam melaksanakan teknik dan cara menganalisis data

melalui pembahasan *staff meeting* untuk melaksanakan mekanisme operasional yang disebabkan oleh kurangnya dukungan kemampuan teknik kader institusi masyarakat dalam memberikan data sebagai bahan dalam melakukan analisis teknis.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Melaksanakan *staff meeting* (pertemuan staf)

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pertemuan staf yang dilakukan oleh PLKB belum dapat melakukan pembentukan kesepakatan yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai kesepakatan politis dan teknis penggarapan program kependudukan dan KB. Dalam kegiatan tersebut, PLKB kurang mengundang para tokoh baik yang telah menyatakan kesediaannya dan yang masih ragu untuk mendukung program KB dengan tujuan untuk mengajak para tokoh berpartisipasi secara aktif.

Dengan demikian selama ini masih kendala dalam pelaksanaan *staff meeting* sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena tidak diikuti oleh semua PLKB hal ini disebabkan dalam penentuan jadwal kegiatan pertemuan tidak didasarkan pada kesepakatan PLKB namun lebih ditentukan oleh Dinas atau UPTD KB.

b. Pertemuan koordinasi teknis pelayanan KB

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertemuan koordinasi teknik pelayanan KB kurang

dilaksanakan dengan baik oleh PLKB sehingga belum dapat menyusun mekanisme operasional di tingkat lini lapangan sebagai urat nadi dan jantung pertahanan penyelenggaraan program KB.

Dengan demikian pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan KB yang dilakukan dengan melakukan pertemuan di tingkat kecamatan belum terlaksana secara optimal hal ini lebih cenderung disebabkan oleh dukungan yang diberikan kepada petugas masih kurang sehingga petugas kesulitan dalam menyampaikan hal-hal teknis yang akan dilaksanakan.

c. Pertemuan koordinasi KB tingkat kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PLKB kurang melakukan pertemuan koordinasi KB di tingkat kecamatan hal ini dikarenakan kurang keterlibatan perangkat kecamatan dan perangkat Desa dalam mendukung pelaksanaan koordinasi sehingga menyebabkan permasalahan-permasalahan program KB di tingkat desa belum dilaksanakan pembahasan secara bersama-sama untuk mengatasi masalah tersebut.

Dengan demikian maka diketahui bahwa pertemuan koordinasi KB di tingkat kecamatan masih kurang sehingga PLKB belum dapat menyampaikan informasi kepada pihak lain dalam hal ini kader kesehatan yang ada di wilayah kecamatan, tokoh formal maupun informal serta pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan

dengan masalah yang akan disampaikan.

d. Pertemuan koordinasi minggongan (rapat minggon)

Berdasarkan hasil penelitian pertemuan koordinasi minggongan (rapat minggon) yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kerjasama antar petugas PLKB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kurang berjalan lancar hal ini dikarenakan dalam kegiatan tersebut belum dilaksanakan secara rutin sesuai dengan jadwal yang ditetapkan hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan dari berbagai pihak terkait dalam mengikuti setiap kegiatan rapat minggongan sehingga setiap diundang untuk mengikuti rapat minggon hanya sedikit yang mengikuti kegiatan rapat tersebut.

e. Pertemuan institusi masyarakat tingkat kecamatan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PLKB kurang melaksanakan pertemuan dengan institusi masyarakat di tingkat kecamatan sehingga dalam pelaksanaannya musyawarah hanya sedikit kader Institusi Masyarakat Pedesaan yang ikut berperan aktif sehingga hal ini menyebabkan PLKB kesulitan untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dalam program KB mengingat Masyarakat Pedesaan merupakan kader yang lebih tahu permasalahan sebenarnya karena lebih dekat dengan masyarakat.

Dengan demikian maka diketahui bahwa PLKB kurang melaksanakan pertemuan dengan institusi masyarakat

di tingkat kecamatan hal ini disebabkan kurangnya dukungan kader institusi masyarakat di tingkat kecamatan dalam mengikuti berbagai kegiatan pertemuan dengan PLKB sehingga permasalahan program KB di setiap wilayah belum dapat diselesaikan secara cepat,

f. Pertemuan institusi masyarakat tingkat desa

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertemuan dengan institusi masyarakat ditingkat desa masih kurang terlaksana dengan baik karena petugas mengalami berbagai kendala seperti kurangnya ketersediaan jumlah PLKB untuk melaksanakan pertemuan secara rutin dengan kader Masyarakat Pedesaan sehingga menyebabkan permasalahan di institusi masyarakat pedesaan kurang diselesaikan dengan cepat.

Dengan demikian diketahui pelaksanaan pertemuan yang dilakukan dengan institusi masyarakat di tingkat desa kurang terlaksana dengan baik mengingat masih kurangnya keikutsertaan institusi masyarakat di tingkat desa dalam mengikuti kegiatan pertemuan yang diselenggarakan oleh PLKB sehingga menyebabkan permasalahan di tingkat RT atau RW belum dapat diselesaikan.

g. Pertemuan dengan kelompok akseptor KB

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertemuan dengan kelompok akseptor KB belum dapat dilaksanakan secara rutin hal ini terkendala kurangnya keikutsertaan akseptor KB dalam mengikuti berbagai

pertemuan yang diselenggarakan oleh PLKB.

Dengan demikian hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya kendala yang menyebabkan pertemuan dengan kelompok akseptor KB belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan masih jarang nya keikutsertaan akseptor KB dalam mengikuti berbagai pertemuan yang diselenggarakan oleh PLKB padahal pertemuan dengan kelompok aksptor KB sangat penting dalam pelaksanaan program KB mengingat dapat mempenagruhi pola pikir dan pemahamannya terhadap program KB.

h. Pertemuan pelayanan kontrasepsi, pelayanan bina-bina keluarga dan peningkatan ekonomi keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PLKB masih kurang melaksanakan pertemuan pelayanan kontrasepsi, pelayanan bina-bina keluarga dan peningkatan ekonomi keluarga sehingga belum adanya peningkatan kepesertaan KB aktif maupun peningkatan ekonomi keluarga hal ini dikarenakan kegiatan pertemuan jarang dilakukan dan kurang mendapatkan dukungan dari instansi terkait dalam membantu mengembangkan wawasan serta menggalan kemitraan dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian pelaksanaan pertemuan yang diselenggarakan sebagai bentuk pelayanan kontrasepsi yang dilakukan oleh PLKB belum terlaksana dengan baik karena adanya

beberapa permasalahan sehingga pertemuan tersebut cenderung hanya dilakukan secara formalitas sehingga peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat kurang mendapat perhatian.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yang, antara lain:

- 1) Pemerintahan Desa, masyarakat dan kader kurang memberikan dukungan dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh PLKB sehingga PLKB kurang memiliki data dasar program KB.
- 2) Kurangnya kerjasama kader yang ada di tiap desa dengan PLKB sehingga menyebabkan rencana kerja yang disusun tidak dapat direalisasikan secara optimal sehingga sasaran dari program KB tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
- 3) Penentuan kegiatan pertemuan staf meeting yang dilaksanakan dibuat oleh UPTD DKBP3A sehingga menyebabkan tidak semua PLKB dapat menghadiri pertemuan staf meeting karena keterbatasan jumlah PLKB di lapangan.

- 4) Kurangnya data yang diterima dari kader menyebabkan PLKB kurang memiliki rencana kerja sebagai dasar dalam melakukan analisis perkembangan program KB di wilayah desa masing-masing.
 - 5) Kurangnya dukungan dari institusi masyarakat pedesaan dalam melakukan berbagai pertemuan teknis sehingga terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program KB belum dapat ditindaklanjuti sehingga permasalahan tersebut tidak dapat dikupas secara tuntas.
 - 6) Akseptor KB kurang memiliki pemahaman yang baik terhadap program KB sehingga PLKB kesulitan dalam melakukan pertemuan dengan akseptor KB karena walaupun telah dijadwalkan dan diundang oleh PLKB namun dalam pertemuan tidak hadir semuanya.
- 1) Memberdayakan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas.
 - 2) Menggalang kemitraan dalam meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan ketahanan keluarga.
 - 3) Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
 - 4) Meningkatkan promosi, perlindungan dan upaya mewujudkan hak-hak reproduksi.
 - 5) Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui program KB, dan
 - 6) Mempersiapkan Sumber Daya Manusia berkualitas sejak pembuahan dalam kandungan sampai dengan lanjut usia.

Hasil observasi menunjukkan bahwa adanya hambatan-hambatan pelaksanaan Program KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yang mengakibatkan pelaksanaan program KB kurang dilaksanakan secara optimal.

Untuk itu perlu dilakukan misi program KB sebagai upaya integral dalam meningkatkan kualitas keluarga. Hal tersebut menurut Saifuddin, A. (2003). dijabarkan ke dalam misi program KB, sebagai berikut:

Dengan demikian hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program KB disebabkan oleh kurangnya memberdayakan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas, kurangnya menggalang kemitraan dalam meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan ketahanan keluarga serta kurangnya meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi kepada pasangan usia subur.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) di Desa

Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, yang antara lain, sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendekatan dan kerjasama dengan Pemerintahan desa, masyarakat dan kader sehingga dapat memberikan dukungan dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh PLKB sehingga PLKB memiliki data dasar program KB sebagai salah satu bahan dalam melakukan evaluasi perkembangan program KB.
- 2) Meningkatkan kerjasama dengan kader yang ada di tiap desa sehingga semua rencana kerja yang disusun dapat direalisasikan secara optimal sehingga sasaran dari program KB dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
- 3) Menentukan kegiatan pertemuan staf meeting yang akan dilaksanakan dibuat dengan persetujuan PLKB sehingga PLKB dapat menghadiri pertemuan staf meeting.
- 4) Meminta data dari kader untuk membuat rencana kerja sebagai dasar dalam melakukan analisis perkembangan program KB di wilayah desa masing-masing.

5) Meminta dukungan dari institusi masyarakat pedesaan dalam melakukan berbagai pertemuan teknis sehingga permasalahan dalam pelaksanaan program KB dapat ditindaklanjuti sehingga permasalahan tersebut dapat dikupas secara tuntas.

- 6) Meningkatkan pemahaman akseptor KB terhadap program KB melalui kegiatan pertemuan yang dilaksanakan secara rutin sehingga dapat meningkatkan pemahaman akseptor KB.

Hasil observasi menunjukkan bahwa adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan Program KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran agar pelaksanaan program KB dapat dilaksanakan secara optimal.

Untuk itu dalam pelaksanaan program KB sesuai dengan buku pegangan TPD (2012:14) dinyatakan bahwa PLKB diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan serta mengendalikan program KB, sebagai berikut:

- 1) Rapat/Pertemuan koordinasi tingkat desa atau sejenisnya untuk menggalang kesepakatan dalam pelaksanaan KIE, pelayanan kontrasepsi dan Pemberdayaan Keluarga dan PUP, kepada masyarakat yang membutuhkan.

- 2) Mendorong dan memfasilitasi pertemuan institusi masyarakat pedesaan paling sedikit 1 x dalam 2 bulan. Pertemuan ini perlu dilakukan untuk mengatur, menjaga, membina dan memelihara rasa persatuan dan semangat pengabdian dan kerelawanan Pos KB Desa, Sub Pos KB desa dan kelompok akseptor di desanya. Pertemuan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai forum untuk mengatur, menjaga, membina dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kader desa.
- 3) Mendorong terselenggaranya pelayanan kontrasepsi yang terjangkau oleh keluarga pra Sejahtera dan Sejahtera I alasan ekonomi (Keluarga miskin).
- 4) Mendorong terselenggaranya pelayanan kontrasepsi mandiri bagi keluarga yang telah mampu.
- 5) Mendorong terselenggaranya pelayanan program KB terintegrasi pada kegiatan ekonomi produktif, BKB, BKR dsb.
- 6) Mendorong terselenggaranya pelayanan Pendewasaan Usia Perkawinan.

Dengan demikian perlu adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan program KB yang antara lain dengan melakukan rapat/pertemuan koordinasi tingkat desa atau sejenisnya untuk menggalang kesepakatan dalam pelaksanaan KIE, pelayanan kontrasepsi dan Pemberdayaan Keluarga dan PUP, kepada

masyarakat yang membutuhkan dan mendorong dan memfasilitasi pertemuan institusi masyarakat pedesaan paling sedikit 1 x dalam 2 bulan. Pertemuan ini perlu dilakukan untuk mengatur, menjaga, membina dan memelihara rasa persatuan dan semangat pengabdian dan kerelawanan Pos KB Desa, Sub Pos KB desa dan kelompok akseptor di desanya. Pertemuan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai forum untuk mengatur, menjaga, membina dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kader desa.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di uraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai pelaksanaan Program KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Program KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dilaksanakan kurang baik sesuai dengan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program KB menurut buku pedoman TPD (2012:61) hal ini di tuliskan bahwa PLKB dalam melakukan pendataan keluarga pada suatu wilayah belum melakukan kunjungan secara langsung ketiap rumah selain itu PLKB kurang melaksanakan berbagai pertemuan dengan akseptor KB sehingga permasalahan-

permasalahan di lapangan belum dapat dipecahkan. Selain itu kurangnya koordinasi yang terjalin dengan pihak-pihak terkait sehingga permasalahan dalam program KB belum dapat diselesaikan dengan baik. Begitupula dengan hasil observasi dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik karena masih adanya beberapa permasalahan yang terjadi seperti tidak lengkapnya data yang dimiliki oleh kader sebagai bahan evaluasi ketercapaian program KB serta kurangnya pembinaan kader IMP yang ada sehingga tidak optimal dalam melaksanakan perannya selain itu pada tahap pelaksanaan petugas PLKB kurang melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait sehingga program KB belum terlaksana secara optimal.

2. Adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran seperti: kurangnya perhatian pemerintahan desa, masyarakat dan kader dalam memberikan dukungan terhadap PLKB dalam pengumpulan data dan kurangnya kerjasama kader yang ada di tiap desa dengan PLKB selain itu kurangnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang

PLKB dalam melaksanakan program KB sehingga terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program KB belum dapat ditindaklanjuti sehingga permasalahan tersebut tidak dapat dikupas secara tuntas.

3. Untuk mengatasi berbagai hambatan-hambatan pelaksanaan program KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, maka dilakukan berbagai upaya yang antara lain : melakukan pendekatan dan kerjasama dengan Pemerintahan desa, masyarakat dan kader sehingga dapat memberikan dukungan dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh PLKB dan meningkatkan kerjasama dengan kader yang ada di tiap desa sehingga semua rencana kerja yang disusun dapat direalisasikan secara optimal sehingga permasalahan dalam pelaksanaan program KB dapat diselesaikan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN, 2013. *Program Keluarga Berencana Nasional*. Jakarta: BKKBN.
- Farida. 2008. *Membangun Desa Partisipatif*. Makasar: Graha Ilmu.

Jurnal MODERAT, Volume 4, Nomor 4, November 2018, hlm 131-149 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat> ISSN: 2622-691X (online)

- Indrayani, 2014. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, Pustaka. Sinar Harapan, Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Irianto, 2014. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta: Salemba., Empat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Mahardika, 2012. *Buku Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.